



ISSN 2356-2005

VOLUME II/NO. 2/DESEMBER 2015

INOVASI

JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN



- ANALISIS PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL DI LUMAMOTOR TANGERANG SELATAN
Ligang Budi Hayoko
- ANALISIS ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN RETURN ON ASSET (ROA) SEBAGAI ALAT UKUR PENILAIAN MINEREA KELANGGAN (Studi Kasus Pada PT. Jaya Real Property)
Dina Novita
- ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEPEMIMPINAN (PEMIMPIN, PENGINTI) TERHADAP MOTIVASI KARYAWAN DALAM MENJABARKAN PRODUK PT. TELKOM INDONESIA Graha Telkom BSD
Lelly Suryani
- ANALISIS KEPATUTAN DUE DILIGENCE YANG DIKEMBANGKAN LEMBAGA MODAL VENTURA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN AKURASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAN (Study Kasus pada Perusahaan Pemangan Usaha dari PT. Sarana Jantara Ventura)
Kartono
- PENGARUH PROFITABILITAS, FIRM SIZE, RISK, BUSINESS ASSET GROWTH, LEVERAGE, KEBUKAAN DIVIDEN TERHADAP INSTITUTIONAL OWNERSHIP (Perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 - 2014)
Nardi Sunardi dan Barhani
- ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI MINEREA KELANGGAN (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Tangerang Selatan)
Khayiatun Nufus

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PASCA SARJANA - UNIVERSITAS PAMULANG**

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang – Tangerang Selatan - Banten

Telp (021) 7412566, Fax (021) 7412491

INOVASI

JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PASCA SARJANA - UNIVERSITAS PAMULANG
VOLUME II, NOMOR 2, Desember 2015

Pelindung

Rektor Universitas Pamulang

Penasehat

Direktur Pasca Sarjana

Penanggung Jawab

Dr. Ir. H. Sarwani, MT,MM

Pemimpin Redaksi

Dr.Ir. Umi Rusilowati, MM

Dewan Redaksi

Dr. Ir. R. Boedi Hasmano, MS.

Dr. Hadi Supratikta, MM

Dr. Rasmadi, M.Pd.

Dr. Edi Suakarjono, Apt., MMkes.,

Dr(c) Sugeng Hidayat, MSi.,

Mitra Bestari

Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA.,

Prof. Dr. Ir. Koesmawan, M.Sc.MBA, DBA

Prof. Dr. Gustian Juanda, MM

Dr. Dayat Hidayat, MM

Redaksi Pelaksana

Surya Budiman, MBA.

Udin Ahidin, SE, MM.

Teguh Yuwono, SS.

Sekretariat

Caryoto, ST.

Heru M. Kurniawan

Alamat Penerbit & Redaksi

Program Studi Magister Manajemen
Pasca Sarjana - Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Barat – Pamulang Tangerang Banten
Telp (021) 7412566, Fax (021) 7412491

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
❑ ANALISIS PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL DI UJM MOTOR TANGERANG SELATAN	
Ugeng Budi Haryoko	1 – 20
❑ ANALISIS ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN RETURN ON ASSET (ROA) SEBAGAI ALAT UKUR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada PT. Jaya Real Property)	
Dina Novita	21 – 35
❑ ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEPEMIMPINAN (PEMIMPIN, PENGIKUT) TERHADAP MOTIVASI KARYAWAN DALAM MEMASARKAN PRODUK PT. TELKOM INDONESIA Graha Telkom BSD.	
Lely Suryani	36 – 50
❑ ANALISIS KEPATUTAN DUE DILIGENCE YANG DIKEMBANGKAN LEMBAGA MODAL VENTURA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN AKURASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN (Study Kasus pada Perusahaan Pasangan Usaha dari PT. Sarana Jakarta Ventura)	
Kartono	51 – 61
❑ PENGARUH PROFITABILITAS, <i>FIRM SIZE</i> , RISIKO BISNIS, <i>ASSET GROWTH</i> , <i>LEVERAGE</i> , KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP <i>INSTITUTIONAL OWNERSHIP</i> (Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2014)	
Nardi Sunardi dan Sarwani	62 – 81
❑ ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Tangerang Selatan)	
Khayatun Nufus	82 – 102

INOVASI

Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen
Program Magister Manajemen
Pasca Sarjana - Universitas Pamulang
Vol. II / No. 2 / Desember / 2015



ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANGERANG SELATAN

Khayatun Nufus *)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem tatakelola keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat pesat dan mendasar, dalam perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu : 1. Era Pra-otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal (1974-1999) 2. Era Transisi Otonomi (2000-2003) dan 3. Era Pasca Transisi (2004-sekarang). Era Pra-otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala orde baru berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 yang bersifat sentralisasi, *top down planning* dan *budgeting*, penggunaan anggaran tradisional, rezim anggaran berimbang (*balance budget*), sistem pembukuan tunggal (*single entry*) dan akuntansi berbasis kas (*cash basic*). Era otonomi semu berlangsung selama 25 tahun sampai dengan pelaksanaan otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang bersifat desentralisasi, *bottom up (participative) Planning and budgeting*, pengguna anggaran berbasis kinerja. Sistem pembukuan berpasangan (*double entry book keeping*). Akuntansi basis kas modifikasi (*modified cash basis*).

Sebagai upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat di andalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada Peraturan Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintah daerah kabupaten kota sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggung jawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 232 ayat (5) disebutkan bahwa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Keuangan Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang

meliputi Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul **“Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana penerapan konsep (*value for money*) penghargaan atas setiap rupiah uang negara dalam realisasi anggaran dan belanja pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3. Bagaimana pengukuran kinerja secara ekonomis, efisien, dan efektif dapat digunakan untuk menilai kinerja finansial pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan.
 - b. Untuk mengetahui penerapan konsep *value for money* (penghargaan atas setiap rupiah uang Negara) dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
 - c. Untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif dapat digunakan untuk menilai kinerja finansial pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Pemerintah daerah untuk pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri. Yang dimaksud daerah disini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah (pusat) maka keuangan daerah merupakan bagian takterpisahkan dari keuangan negara.

Adapun beberapa permasalahan yang dipandang perlu diatur secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terpisah. Beberapa contoh permendagri yang mengatur masalah pengelolaan keuangan daerah secara khusus antara lain:

- a. Permendagri No 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah juga Permendagri No 11 tahun 2007.
- b. Permendagri No 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Permendagri N0 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).Semua Penerimaan Daerah danPengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Belanja Pelayanan Publik Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).Elemen–elemen belanja di atas bila dijabarkan lagi terdiri dari Belanja Administrasi Umum . Jenis belanja yang termasuk dalam kelompok ini adalah : Belanja pegawai, Belanja barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Pemeliharaan

- a. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset). Jenis belanja yang termasuk kelompok ini adalah : Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan dinas, dan Belanja Pemeliharaan.
- b. Belanja Modal/Pembangunan (*Capital Investment Expenditure*)
Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).

Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan Standar Analisis Belanja (SAB), yang dimaksud dengan SAB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Tolok Ukur Kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran berbasis kinerja, dan Standar Biaya menjadi dasar untuk menilai kewajaran biaya suatu program atau kegiatan.

C. Penerapan Konsep *Value For Money*

Satuan ukur terkait dengan Efisiensi biaya (pengeluaran) dan kualitas pelayanan. Alokasi biaya (pengeluaran daerah) harus dikaitkan dengan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Satuan ukur unit kerja harus: 1) berupa angka numerik, 2) dapat diperbandingkan, 3) cukup spesifik. Hal tersebut dimaksud agar kinerja unit kerja dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja atau kinerja unit kerja lain, dan sekaligus dapat digunakan untuk melihat indikasi masalah unit kerja yang mungkin muncul terkait dengan pengeluaran daerah yang dilakukan.

Satuan ukur harus bisa dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal untuk mengontrol efisiensi dan efektifitas pengeluaran yang dilakukan. Penggunaan satuan ukur ini bagi pihak internal adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Sementara pihak eksternal menggunakannya sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi untuk publik.

D. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. "Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bagaimana menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien" (Mardiasmo 2002:121). Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Substansi pengukuran kinerja keuangan berdasarkan indikator alokasi biaya dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian teknik ini sering disebut dengan pengukuran 3 E yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena di satu pihak, mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedang di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika program dapat dilakukan dengan efisien dan efektif maka program tersebut dapat dikatakan cost-effectiveness.

E. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip – prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005. Laporan keuangan dihasilkan dari tiap-tiap SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Isi dari Laporan Realisasi Anggaran antara lain :

- a. Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- b. Menyajikan ikhtisar pendapatan dan penggunaan belanja yang dikelola oleh SKPD pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.
- c. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- d. Menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Adalah pelaporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Isi dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain :

- a. Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam pelaporan realisasi anggaran dan neraca.
- b. Penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Analisis Data

Untuk dapat menyusun skripsi ini, dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, sehingga data yang diperoleh memadai untuk digunakan sebagai dasar untuk membahas masalah yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori sesuai dengan ketentuan. Bertujuan menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan serta menganalisis berbagai data yang ditemukan dan membandingkannya dengan teori yang ada, kemudian dianalisis penerapannya dalam praktek sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, Dalam menganalisis, penulis menganalisis data-data yang didapat sebagai berikut :

1. Analisis Varians Belanja.

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanjadengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporandapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran dengan realisasinya yang bisadinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanjadikategorikan menjadi dua jenis, yaitu 1) Selisih disukai (*favourable variance*) dan 2) selisihtidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannyamaka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannyamaka dikategorikan *unfavourable variance*. Rasio ini dirumuska sebagai berikut:

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

2. Analisis Pertumbuhan Belanja.

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ketahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasankenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhanbelanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Analisis Pertumbuhan Belanja diukur dengan:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Belanja Thn } t - \text{Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

3. Analisis Keserasian Belanja.

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal initerkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsianggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasibelanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja.

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanjaoperasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerahyang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnyahabis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendekdan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rumus perhitungan belaja operasi:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja.

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total reallisasibelanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapatmengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modalpada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda

dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Rumus perbandingan belanja Modal:

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi Belanja.

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data menggunakan alat dan metode atau teknik pengumpulan data baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan data ini melalui :

1. Penelitian Kepustakaan
2. Penelitian Lapangan
 - a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek, proses kegiatan Organisasi untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Prasetya Irawan (2004 : 179) populasi adalah keseluruhan yang hendak dijelaskan oleh peneliti melalui penelitiannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2009 sampai dengan 2011 dan laporan realisasi keuangan tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 sd 2014.
 - a. Anggaran Belanja



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan telah menyusun Anggaran Belanja Daerah. Berikut data Anggaran Belanja Daerah Pada Tahun Anggaran 2011 sd 2014.

Tabel 4.1 : Rekapitulasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 sd 2014

No	URAIAN	Anggaran 2011 (Rp)	Anggaran 2012 (Rp)	Anggaran 2013 (Rp)	Anggaran 2014 (Rp)
	BELANJA DAERAH	8,709,482,766.00	14,965,854,387.00	13,105,756,362.00	15,020,971,500.00
	BELANJA OPERASI	7,986,849,866.00	14,172,051,887.00	12,357,778,852.00	14,457,474,800.00
	Belanja Pegawai	3,923,453,421.00	4,646,329,387.00	4,460,506,362.00	4,507,571,500.00
	Belanja Barang dan Jasa	4,063,396,445.00	9,525,722,500.00	7,897,272,490.00	9,949,903,300.00
	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
	BELANJA MODAL	722,632,900.00	793,802,500.00	747,977,510.00	563,496,700.00
	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	131,602,900.00	450,670,000.00	627,772,500.00	303,096,700.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	210,082,500.00	0.00	0.00
	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Aset tetap Lainnya	591,030,000.00	133,050,000.00	120,205,010.00	260,400,000.00
	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	BELANJA TAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Tidak terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan keu Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan

c. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011sd 2014.

Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah dibuat setelah pelaksanaan belanja daerah. Sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 sd 2014

No	URAIAN	Realisasi 2011 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)
	BELANJA DAERAH	8,024,193,986.00	13,338,356,488.00	11,559,388,289.00	13,285,819,476.00
	BELANJA OPERASI	7,348,938,686.00	12,562,214,425.00	10,865,508,539.00	12,862,117,726.00



	Belanja Pegawai	3,584,782,168.00	4,357,315,667.00	4,169,403,931.00	4,340,426,733.00
	Belanja Barang dan Jasa	3,764,156,518.00	8,204,898,758.00	6,696,104,608.00	8,521,688,993.00
	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
	BELANJA MODAL	675,255,300.00	776,142,063.00	693,879,750.00	423,701,750.00
	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	122,725,000.00	131,818,563.00	596,372,000.00	291,851,750.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Aset tetap Lainnya	552,530,300.00	444,323,500.00	97,507,750.00	131,850,000.00
	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	BELANJA TAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Tidak terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan keu Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan

- d. Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 sd 2014
Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, Data-data yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.3 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011

No	URAIAN	Anggaran 2011 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)	%
	BELANJA DAERAH	8,709,482,766.00	8,024,193,986.00	92.13
	BELANJA OPERASI	7,986,849,866.00	7,348,938,686.00	92.01
	Belanja Pegawai	3,923,453,421.00	3,584,782,168.00	91.37
	Belanja Barang dan jasa	4,063,396,445.00	3,764,156,518.00	92.64
	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
	BELANJA MODAL	722,632,900.00	675,255,300.00	93.44%
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	131,602,900.00	122,725,000.00	93.25
	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
	Belanja Aset tetap Lainnya	591,030,000.00	552,530,300.00	93.49
	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00



BELANJA TAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00
Belanja Tidak terduga	0.00	0.00	0.00
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0.00	0.00	0.00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.4 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

No	URAIAN	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	%
	BELANJA DAERAH	14,965,854,387.00	13,338,356,488.00	89.13
	BELANJA OPERASI	14,172,051,887.00	12,562,214,425.00	88.64
	Belanja Pegawai	4,646,329,387.00	4,357,315,667.00	93.78
	Belanja Barang dan jasa	9,525,722,500.00	8,204,898,758.00	86.13
	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
	BELANJA MODAL	793,802,500.00	776,142,063.00	97.78
	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	450,670,000.00	131,818,563.00	29.25
	Belanja Gedung dan Bangunan	210,082,500.00	200,000,000.00	95.20
	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
	Belanja Aset tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00
	BELANJA TAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00
	Belanja Tidak terduga	0.00	0.00	0.00
	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.5 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan tahun 2013

No	URAIAN	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%
	BELANJA DAERAH	13,105,756,362.00	11,559,388,289.00	88.20
	BELANJA OPERASI	12,357,778,852.00	10,865,508,539.00	87.92
	Belanja Pegawai	4,460,506,362.00	4,169,403,931.00	93.47
	Belanja Barang	7,897,272,490.00	6,696,104,608.00	84.79
	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00



	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
BELANJA MODAL		747,977,510.00	693,879,750.00	92.77
	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	627,772,500.00	596,372,000.00	95.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
	Belanja Aset tetap Lainnya	120,205,010.00	97,507,750.00	81.12
	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00
BELANJA TAK TERDUGA		0.00	0.00	0.00
	Belanja Tidak terduga	0.00	0.00	0.00
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		0.00	0.00	0.00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.6 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014

No	URAIAN	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%
BELANJA DAERAH		15,020,971,500.00	13,285,819,476.00	88.45
BELANJA OPERASI		14,457,474,800.00	12,862,117,726.00	88.97
	Belanja Pegawai	4,507,571,500.00	4,340,426,733.00	96.29
	Belanja Barang dan jasa	9,949,903,300.00	8,521,688,993.00	85.65
	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
BELANJA MODAL		563,496,700.00	423,701,750.00	75.19
	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	303,096,700.00	291,851,750.00	96.29
	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
	Belanja Aset tetap Lainnya	260,400,000.00	131,850,000.00	50.63
	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00
BELANJA TAK TERDUGA		0.00	0.00	0.00
	Belanja Tidak terduga	0.00	0.00	0.00
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		0.00	0.00	0.00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan



Tabel 4.7 : Rekapitulasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 sd 2014

No	URAIAN	Anggaran 2011 (Rp)	%	Anggaran 2012 (Rp)	%	Anggaran 2013 (Rp)	%	Anggaran 2014 (Rp)	%
	BELANJA DAERAH	8,709,482,766.00	100	14,965,854,387.00	100	13,105,756,362.00	100	15,020,971,500.00	100
	BELANJA OPERASI	7,986,849,866.00	91.70	14,172,051,887.00	94.70	12,357,778,852.00	94.29	14,457,474,800.00	96.25
	Belanja Pegawai	3,923,453,421.00	45.05	4,646,329,387.00	31.05	4,460,506,362.00	34.03	4,507,571,500.00	30.01
	Belanja Barang dan Jasa	4,063,396,445.00	46.65	9,525,722,500.00	63.65	7,897,272,490.00	60.26	9,949,903,300.00	66.24
	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BELANJA MODAL	722,632,900.00	8.30	793,802,500.00	5.30	747,977,510.00	5.71	563,496,700.00	3.75
	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	131,602,900.00	1.51	450,670,000.00	3.01	627,772,500.00	4.79	303,096,700.00	2.02
	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	210,082,500.00	1.40	0.00	0.00	1.00	0.00
	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00
	Belanja Aset tetap Lainnya	591,030,000.00	6.79	133,050,000.00	0.89	120,205,010.00	0.92	260,400,000.00	1.73
	Belanja Aset Lainnya	0.00		0.00		0.00		0.00	
	BELANJA TAK TERDUGA	0.00		0.00		0.00		0.00	
	Belanja Tidak terduga	0.00		0.00		0.00		0.00	
	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0.00		0.00		0.00		0.00	
	Belanja Bantuan keu Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

- e. Perbandingan perubahan setiap tahun komponen belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4.8

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 sd 2014

No	URAIAN	Realisasi 2011 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)	%	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)	%
	BELANJA DAERAH	8,024,193,986.00	100	13,338,356,488.00	100	11,559,388,289.00	100	13,285,819,476.00	100
	BELANJA OPERASI	7,348,938,686.00	91.58	12,562,214,425.00	94.18	10,865,508,539.00	94.00	12,862,117,726.00	96.81
	Belanja Pegawai	3,584,782,168.00	44.67	4,357,315,667.00	32.67	4,169,403,931.00	36.07	4,340,426,733.00	32.7
	Belanja Barang	3,764,156,518.00	46.91	8,204,898,758.00	61.51	6,696,104,608.00	57.93	8,521,688,993.00	64.1



	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BELANJA MODAL	675,255,300.00	8.42	776,142,063.00	5.82	693,879,750.00	6.00	423,701,750.00	3.19
	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	122,725,000.00	1.53	131,818,563.00	0.99	596,372,000.00	5.16	291,851,750.00	2.2
	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00		200,000,000.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Aset tetap Lainnya	552,530,300.00	6.89	444,323,500.00	3.33	97,507,750.00	0.84	131,850,000.00	0.99
	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BELANJA TAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Tidak terduga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Bantuan keu Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan

1) Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011.

Besar alokasi belanja Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 8,709,482,766.00 dengan realisasi Rp. 8,024,193,986.00 atau 92.13% yang dialokasikan untuk belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 7,986,849,866.00 dan realisasi belanja Operasi adalah Rp. 7,348,938,686.00 atau 92.01%. dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 3,584,782,168.00 belanja barang dan jasa Rp.3,764,156,518.00. Belanja Modal tahun 2011, belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 722,632,900.00 sedangkan realisasi Belanja Modal adalah Rp. 675,255,300.00 atau 93.44%. Rp. 122,725,000.00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin, Rp. 552,530,300.00 merupakan belanja modal Aset tetap lainnya.

2) Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012.

Besar alokasi belanja Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 14,965,854,387.00 dengan Realisasi Rp. 13,338,356,488.00 atau 89.13% yang dialokasikan belanja operasi dan belanja modal Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan . Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 7,348,938,686.00 dengan realisasi

sebesar Rp. 12,562,214,425.00 atau 88.64% dengan rincian belanja pegawai Rp. 4,646,329,387.00 belanja barang dan jasa 9,525,722,500.00 . Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 793,802,500.00 dengan realisasi Rp. 776,142,063.00 atau 97.78% . Rp. 450,670,000.00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin Rp. 210,082,500.00 merupakan belanja modal gedung dan bangunan Rp. 133,050,000.00 merupakan belanja Modal aset tetap lainnya.

3) Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2013

Besar alokasi belanja tahun 2013 adalah sebesar Rp. 13,105,756,362.00 dengan realisasi belanja Rp. 11,559,388,289.00 atau 88% yang dialokasikan belanja Operasi dan belanja modal. Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 12,357,778,852.00 dengan realisasi Rp. 10,865,508,539.00 atau 88% dengan rincian belanja pegawai Rp. 4,169,403,931.00 belanja barang dan jasa Rp. 6,696,104,608.00 belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 747,977,510.00 dengan realisasi Rp. 693,879,750.00 atau 93%. 596,372,000.00 merupakan belanja peralatan dan mesin Rp. 97,507,750.00 Aset tetap lainnya

4) Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2014

Besar alokasi belanja tahun 2014 adalah sebesar Rp. 13,105,756,362.00 dengan realisasi belanja Rp. 11,559,388,289.00 atau 88% yang dialokasikan belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp. 12,357,778,852.00 dengan realisasi Rp. 10,865,508,539.00 atau 88% dengan rincian belanja pegawai Rp. 4,340,426,733.00 belanja barang dan jasa Rp. 8,521,688,993.00 dan Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 747,977,510.00 dengan Realisasi Rp. 693,879,750.00 atau 93% 291,851,750.00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin 131,850,000.00 merupakan belanja modal aset tetap lainnya.

2. Penerapan konsep *Value for money*

Kinerja Keuangan Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah dinilai cukup baik, organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dicapai karena administrasi dan penyediaan jasa, dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif.

- a. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penghematan yang mencakup pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan.
- b.. Efisiensi yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, dimana suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

- c. Efektivitas (hasil guna) Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan atau target kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan belum tercapai seluruhnya. Kegiatan operasional Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan belum efektif, dimana proses kegiatan tersebut belum mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Indikator efisiensi dan efektivitas digunakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan secara bersama-sama. Karena di satu pihak, pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedang di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien.

3. Pengukuran kinerja keuangan secara Ekonomis, Efisien dan Efektif

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, realisasi tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013 masih tergolong rendah, dimana realisasi yang masih rendah dengan jumlah yang dianggarkan sedangkan tahun 2014 mengalami peningkatan. Dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mengah Kota Tangerang Selatan lebih mengutamakan belanja Operasi, karena di dalamnya terdapat belanja barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat yang sifatnya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam pengukuran Kinerja Keuangan dengan menerapkan konsep *Value for money* Berdasarkan Realisasi Aggaran belanja Daerah sebagai berikut:

a. Analisis Varians

Analisis Varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara anggaran belanja dengan realisasi anggaran.

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 4.9 : Analisis Varians Belanja T.A 2011-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisish	Persentase (%)
2011	8,709,482,766.00	8,024,193,986.00	-685,288,780.00	(7.87)
2012	14,965,854,387.00	13,338,356,488.00	-1,627,497,899.00	(10.87)
2013	13,105,756,362.00	11,559,388,289.00	-1,546,368,073.00	(11.80)
2014	15,020,971,500.00	13,285,819,476.00	-1,735,152,024.00	(11.55)



b. Analisis pertumbuhan belanja

Analisis Pertumbuhan Belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun.

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn}_t - \text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 4.10: Pertumbuhan Belanja T.A 2012

Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2012	Realisasi Belanja Tahun 2011	Kenaikan (penurunan)	Persentase %
BELANJA	13,338,356,488.00	8,024,193,986.00	5,314,162,502.00	66.23
BELANJA OPERASI	12,562,214,425.00	7,348,938,686.00	5,213,275,739.00	70.94
BELANJA MODAL	776,142,063.00	675,255,300.00	100,886,763.00	14.94

Tabel 4.11 : Pertumbuhan Belanja T.A 2013

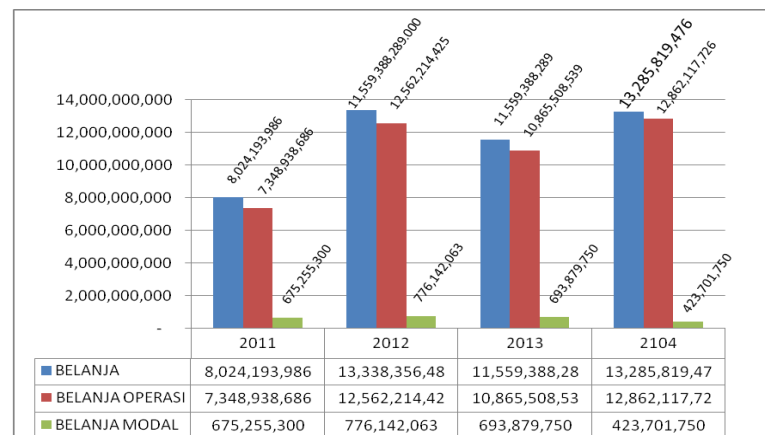
Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2013	Realisasi Belanja Tahun 2012	Kenaikan (penurunan)	%
BELANJA	11,559,388,289.00	13,338,356,488.00	-1,778,968,199.00	(13.34)
BELANJA OPERASI	10,865,508,539.00	12,562,214,425.00	-1,696,705,886.00	(13.51)
BELANJA MODAL	693,879,750.00	776,142,063.00	-82,262,313.00	(10.60)

Tabel 4.12 : Pertumbuhan Belanja T.A 2014

Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2014	Realisasi Belanja Tahun 2013	Kenaikan (penurunan)	persentase %
BELANJA	13,285,819,476.00	11,559,388,289.00	1,726,431,187.00	14.94
BELANJA OPERASI	12,862,117,726.00	10,865,508,539.00	1,996,609,187.00	18.38
BELANJA MODAL	423,701,750.00	693,879,750.00	-270,178,000.00	(38.94)

Tabel 4.13 : Realisasi Pertumbuhan Belanja T.A 2011-2014

Tahun	Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal
2011	8,024,193,986	7,348,938,686	675,255,300
2012	13,338,356,488	12,562,214,425	776,142,063
2013	11,559,388,289	10,865,508,539	693,879,750
2014	13,285,819,476	12,862,117,726	423,701,750


Gambar 4.2
Kurva Pertumbuhan Belanja 2011-2014

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi

1) Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi pada tahun anggaran bersangkutan.

$$\text{Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.14
Analisis Belanja Operasi Terhadap Belanja T.A 2011 - 2014

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja (%)
2011	7,348,938,686.00	8,024,193,986.00	91.58
2012	12,562,214,425.00	13,338,356,488.00	94.18
2013	10,865,508,539.00	11,559,388,289.00	94.00
2014	12,862,117,726.00	13,285,819,476.00	96.81

2) Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.15
Analisis Belanja Modal Terhadap Belanja T.A 2011 - 2014

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja (%)
2011	675,255,300.00	8,024,193,986.00	8.42
2012	776,142,063.00	13,338,356,488.00	5.82
2013	693,879,750.00	11,559,388,289.00	5.99
2014	423,701,750.00	13,285,819,476.00	3.19



2011	675,255,300.00	8,024,193,986.00	8.42
2012	776,142,063.00	13,338,356,488.00	5.82
2013	693,879,750.00	11,559,388,289.00	6.00
2014	423,701,750.00	13,285,819,476.00	3.19

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.16
Rasio Efisiensi Belanja T.A 2011 - 2014

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja (%)
2011	8,024,193,986.00	8,709,482,766.00	92.13
2012	13,338,356,488.00	14,965,854,387.00	89.13
2013	11,559,388,289.00	13,105,756,362.00	88.20
2014	13,285,819,476.00	15,020,971,500.00	88.45

C. Pembahasan

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja

Berdasarkan tabel 4.9 kita dapat mengambil kesimpulan. Bahwa pada tahun anggaran 2011 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif, yang menunjukkan adanya efisiensi atau penghematan anggaran belanja sebesar Rp. (685,288,780.00) atau sebesar (7.87)% dari total belanja APBD. Pada tahun anggaran 2012 selisih anggaran belanja sebesar Rp. (1,627,497,899.00) atau sebesar (10.87)% dari total belanja APBD. Pada tahun anggaran 2013 selisih anggaran belanja sebesar Rp. (1,546,368,073.00) atau sebesar (11.80) dari total belanja APBD. Pada tahun anggaran 2014 selisih anggaran belanja sebesar Rp. (1,735,152,024.00) atau sebesar (11.55)%.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja.

Tabel 4.17

Tabel Pertumbuhan Realisasi Belanja T. A 2011-2014

Uraian	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Realisasi Belanja	8,024,193,986.00	13,338,356,488.00	11,559,388,289.00
	13,338,356,488.00	11,559,388,289.00	13,285,819,476.00
Kenaikan (penurunan)	5,314,162,502.00	1,778,968,199.00	1,726,431,187.00
%	66.23	-13.34	14.94

Berdasarkan tabel 4.17 secara keseluruhan dapat kita lihat terjadi pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan. Total pertumbuhan realisasi belanja pada

tahun 2012 mengalami kenaikan. Dimana terdapat belanja modal berupa belanja gedung dan bangunan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak Rp 5,314,162,502.00 atau sebesar 66.23% dari total realisasi belanja tahun 2011. Ditahun 2013 mengalami penurunan belanja. Dimana belanja di tahun 2013 hanya terdapat belanja operasi dan modal yang sifatnya Rutin/jangka menengah. realisasi belanja tahun 2013 adalah sebanyak Rp. **(1,778,968,199.00)** atau sebesar (-13.34%) dari total realisasi belanja tahun 2012. Dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan belanja dimana ditahun 2014 terdapat belanja berupa bantuan barang dan bedah warung untuk para pelaku UKM, yang total pertumbuhan realisasi belanja tahun 2014 adalah sebanyak Rp. 1,726,431,187.00 atau sebesar 14.94% dari total realisasi belanja tahun 2013.

3. Analisis Keserasian Belanja

Tabel 4.18
Rasio keserasian Belanja T.A 2011-2014

Tahun Anggaran	Rasio Belanja Operasi (%)	Rasio Belanja Modal (%)	Total
2011	91.58	8.42	100
2012	94.18	5.82	100
2013	94	6	100
2014	96.81	3.19	100

Berdasarkan tabel 4.18 dapat kita lihat rasio pembagian anggaran belanja. Dimana penggunaan anggaran paling banyak dialokasikan ke belanja operasi yang pada tahun 2011 belanja operasi mendapatkan rasio sebanyak 91,58% tahun 2012 sebanyak 94,18% tahun 2013 sebanyak 94% dan tahun 2014 sebanyak 96,81%. Untuk belanja modal rasio pada tahun 2011 sebanyak 8,42%, tahun 2012 sebanyak 5,82%, tahun 2013 sebanyak 6%, dan tahun 2014 sebanyak 3,19%.

4. Rasio Efisiensi

Berdasarkan tabel 4.16 dapat kita lihat terjadi efisiensi penggunaan anggaran belanja tahun 2011 total realisasi belanjanya sebesar 92,13% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. Tahun 2012 total realisasi belanja hanya sebesar 89,13% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. Tahun 2013 total realisasi belannya hanya sebesar 88,20% dari total anggaran belanja yang dianggarkan APBD. Tahun 2014 total realisasi belanja hanya sebesar 88,45% dari total anggaran belanja yang dianggarkan APBD.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan realisasi belanja paling tinggi terjadi pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2011, 2012 dan 2013. Tahun 2011 belanja barang dan jasa 46.91% dan belanja pegawai 46.67%, Tahun 2012 belanja barang dan jasa 61.51% dan belanja pegawai 32.67%, Tahun 2013 belanja barang dan jasa 57.93%, tahun 2014 belanja pegawai sama seperti tahun 2012 32.67%, belanja barang dan jasa 64.14%. paling tinggi belanja barang dan jasa persentasinya pada tahun tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan melaksanakan program kegiatan bantuan dalam bentuk barang kepada para Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Beberapa belanja realisasinya masih belum sesuai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam penganggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
2. Penerapan konsep *Value for Money* yang berdasarkan Ekonomis, Efisien dan Efektif pada Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

Tabel 5.1 : Analisis Varians Belanja T.A 2011-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase (%)
2011	8,709,482,766.00	8,024,193,986.00	-685,288,780.00	(7.87)
2012	14,965,854,387.00	13,338,356,488.00	-1,627,497,899.00	(10.87)
2013	13,105,756,362.00	11,559,388,289.00	-1,546,368,073.00	(11.80)
2014	15,020,971,500.00	13,285,819,476.00	-1,735,152,024.00	(11.55)

Tabel 5.2**Rasio Efisiensi Belanja T.A 2011 - 2014**

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja (%)
2011	8,024,193,986.00	8,709,482,766.00	92.13
2012	13,338,356,488.00	14,965,854,387.00	89.13
2013	11,559,388,289.00	13,105,756,362.00	88.20
2014	13,285,819,476.00	15,020,971,500.00	88.45

3. Kinerja Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dengan konsep *Value for Money* sudah dapat dikatakan cukup baik. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi dengan menganalisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dan dari hasil perhitungan dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Dari analisis varians belanja dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan kinerja yang baik dikarenakan ada hasil negatif yang menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran. Tahun 2011 terdapat selisih Rp. 685,288,780.00, tahun 2012 Rp.



- 1,627,497,899.00, tahun 2013 Rp. 1,546,368,073.00, tahun 2013 Rp. 1,546,368,073.00 dan tahun 2014 Rp1,735,152,024.00
- b. Dari hasil analisis pertumbuhan belanja Tahun Anggaran 2011/2012, Tahun Anggaran 2012/2013 dan Tahun Anggaran 2013/2014 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja karena terdapat belanja gedung Dan bangunan yang cukup besar nilainya. Pada tahun 2012 adalah pertumbuhan sebesar 66.23%, Tahun 2013 adalah terdapat penurunan belanja karena hanya terdapat belanja rutin yang nilainya tidak terlalu tinggi, penurunan belanja sebesar -13.34%, dan pada tahun 2014 pertumbuhan belajanya adalah sebesar 14.94%
 - c. Dari hasil analisis keserasian belanja maka dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dalam menggunakan aktivitas belanjanya, tidak hanya memfokuskan belanja pada belanja operasi akan tetapi juga kepada belanja modal.
 - d. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat dilihat mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2014. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan sudah melakukan penghematan anggaran. Pada T.A anggaran 2011 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan melakukan penghematan sebesar 7,87% T.A 2012 sebesar 10.87%, T.A 2013 sebesar 11.80% dan pada T.A 2014 sebesar 11.55%.

DAFTAR PUSTAKA

- Modul Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Pamulang
- Husnan, Suad, "*Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Daerah*", Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Penerbit Amp Ykn, Ygyakarta 2004.
- Gunawan Adisaputro, Drs M.BA, Marwan Asri, Drs, M.Ba, "*Anggaran Perusahaan*", Edisi Kedua, Cetakan Kedua Penerbit Bpfe, Yogyakarta, 2008
- Mahmud, "*Dasar-dasar Manajemen Keuangan Daerah*", Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010
- Nurlan Darise, Drs, AK M.Si, "*Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*" (Skpd) Dan BLU Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, Penerbit Indeks, Jakarta, 2009.
- Munawir, S, "*Analisa Laporan Keuangan*", Edisi keempat, Cetakan Kelima Belas Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2010
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nordiawan. D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Yuwono, S., I.T. Agus, dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berdasarkan Kinerja)*. Bayumedia Publising, Malang.
- <https://yusranlapananda.wordpress.com>